

## GOOD GOVERNANCE DAN SUSTAINABILITY DEVELOPMENT (Kasus Pembangunan Masyarakat di Indonesia)

Agus Sjafari

### Abstrak:

*Garis-garis Besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dari amanat GBHN di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional tidak menghendaki uni dimensionalisasi manusia Indonesia. Pemberian prioritas pada pembangunan bidang pembangunan ekonomi, tidak harus diartikan adanya pengabaian terhadap dimensi-dimensi lain pembangunan nasional. Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, pembangunan bidang-bidang lain juga harus ditingkatkan.*

*Pembangunan masyarakat (community development) yang dilakukan dalam sebuah negara berkembang selama ini selalu berada dalam kondisi yang dilematis. Maksudnya adalah bahwa dalam proses pembangunan tersebut selalu memiliki akibat yang kurang menguntungkan bagi aspek-aspek yang lain. Hal tersebut tidak terlepas dari sebuah pilihan model pembangunan masyarakat tersebut. Pilihan model pembangunan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan aspek tertentu, seringkali mengabaikan aspek yang lainnya. Style of development yang mendominasi proses pembangunan nasional kita sampai akhir-akhir ini nampaknya terlalu bertumpu pada mekanisme distribusi dan alokasi yang sentralistis dalam mencoba memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Style of development yang demikian cenderung menginterpretasikan "pembangunan masyarakat" dalam arti sempit.*

**Kata Kunci:** Community development, pembangunan, pertumbuhan.

## Pendahuluan

Pembangunan masyarakat (*community development*) yang dilakukan dalam sebuah negara berkembang selama ini selalu berada dalam kondisi yang dilematis. Maksudnya adalah bahwa dalam proses pembangunan tersebut selalu memiliki akibat yang kurang menguntungkan bagi aspek-aspek yang lain. Hal tersebut tidak terlepas dari sebuah pilihan model pembangunan masyarakat tersebut. Pilihan model pembangunan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan aspek tertentu, seringkali mengabaikan aspek yang lainnya.

Rentangan dilematis yang menjadi perbedaan membentang mulai dari perbedaan persepsi tentang hakekat dari nilai pembangunan yang harus dicapai (indikator ekonomi klasik versus indikator neo-ekonomi); perbedaan persepsi tentang hakekat proses pembangunan itu sendiri (teori konflik versus teori equilibrium); perbedaan pendapat tentang pemahaman dan jalur pembangunan (*unilinear versus multilinear, necessity model versus passibility model*); perbedaan persepsi tentang dimensi hubungan antar bangsa di dalam proses pembangunan (*dependency model versus difusionisme model*); perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya (*limits to growth versus models of doom*); perbedaan pandangan tentang pemilihan faktor produksi (*capitalist mode of production versus socialist mode of production*); perbedaan antara strategi pembangunan (pertanian versus industri: *big push strategy versus unbalanced growth strategy*)<sup>1</sup>.

Khusus terkait dengan pembangunan yang dilakukan di Indonesia, kondisi dilematis tersebut seringkali menghantui bagi setiap pengambil keputusan politik dalam menentukan model-model pembangunan yang harus dipakai. Hal ini sangat bergantung kepada konfigurasi kontekstual yang dihadapi negara selama ini. Salah satunya adalah konfigurasi ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia selama ini.

---

1 Moeljarto.1993. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep. Arah dan Strategi*. Yogyakarta:Tiara Wacana Yoga. Hal.3 - 4

Konfigurasi ekonomi yang tidak memberi batas toleransi yang cukup luas bagi pemerintahan di Indonesia selama ini untuk tidak dapat berbuat kesalahan. *Margin of error* yang demikian sempit, tidak memberi ruang gerak yang cukup untuk memilih pelbagai alternatif model kecuali bertumpu pada paradigma pertumbuhan. Rehabilitasi, stabilisasi dan konsolidasi ekonomi dilaksanakan dengan mengacu kepada paradigma pertumbuhan tersebut.

Manifestasi dari keputusan politik untuk mengacu kepada paradigma pertumbuhan nampak di dalam kebijaksanaan ekonomi yang mempunyai ciri-ciri: (a) membangun kembali perekonomian di atas prinsip-prinsip ekonomi pasar, perekonomian terbuka, iklim moneter yang stabil serta pembatasan campur tangan pemerintah dalam perekonomian; (b) mengubah sistem ekonomi yang alokatif dan distributif menjadi sistem ekonomi insentif; (3) merangsang kaum *entrepreneur* untuk mengadakan investasi, inovasi dan produksi melalui mekanisme harga, kebijaksanaan pajak dan tarif, perkreditan dan kebijaksanaan anggaran dan moneter; dan (d) menarik investasi dan bantuan luar negeri.<sup>2</sup>

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa strategi pertumbuhan tersebut telah membawa hasil. Selama beberapa dasawarsa era 1970-an sampai dengan akhir 1990-an pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 7,9 persen per-tahun. Prestasi ekonomi yang demikian telah mengangkat posisi Indonesia di mata Bank Dunia, yaitu dari negara yang tergolong negara miskin menjadi negara yang tergolong pada kategori negara yang berpenghasilan rendah.

Manifestasi keberhasilan tersebut antara lain tercermin dari peningkatan relatif kesejahteraan masyarakat; pergeseran relatif dari struktur ekonomi agraris menuju ke struktur ekonomi industri; peningkatan produktivitas agraris melalui perbaikan infrastruktur dan revolusi bio-kimia serta difusi teknologi; penetrasi jaringan transportasi dan komunikasi ke pelosok-pelosok, menguak daerah

---

2 Sadli M. 1973. Penerapan Teknologi dan kesempatan Kerja: Pengalaman Indonesia. PRISMA, No.3 Tahun II.

terpencil dari belunggu keterasingan dan mengintegrasikan mereka ke dalam tata kehidupan yang berskala nasional dan global.<sup>3</sup>

Di sisi lain, pembangunan nasional juga telah mentransformasikan ikatan – ikatan solidaritas tradisional dan memperkenalkan pola hubungan agraris yang baru yang lebih berkiblat pada mekanisme pasar; mempersempit dikotomi kultural kota dan desa; mengakibatkan konsentrasi dan marginalisasi; meningkatkan ketergantungan masyarakat desa pada sistem ekonomi nasional dan global; menumbuhkan disorientasi dan keterasingan kultural; serta mengakibatkan gangguan pada keseimbangan ekologis.

Euforia pembangunan dengan menggunakan paradigma pertumbuhan yang selama ini dijadikan sebagai "ideologi pembangunan" khususnya oleh rezim pemerintahan orde baru, dimana di tahun 70-an sampai dengan awal tahun 90-an mampu meningkatkan kesejahteraan fisik masyarakat, ternyata pada mendekati akhir tahun 90-an menuai badai krisis.

Tepatnya pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi global telah melanda dunia yang ditandai dengan krisis mata uang, negara kita mengalami keterpurukan ekonomi yang maha dahsyat yang ditandai oleh beberapa indikator ekonomi antara lain : 1) merosotnya nilai mata uang rupiah hingga mencapai nilai Rp. 16.000,-. Sebuah sejarah kemerosotan nilai rupiah terendah; 2) inflasi hampir mencapai angka 200 %; 3) rasionalisasi buruh dengan jumlah yang sangat besar; 4) rontoknya beberapa investor baik investor dalam negeri maupun investor dari luar.

Selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun perjalanan reformasi yang ada di Republik ini, ternyata sampai saat ini belum menandakan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

---

3 Moeljarto. *op.cit.* Hal 19.

## Rumusan Masalah

Melihat potret problematika pembangunan yang ada di negara kita, muncul sebuah pertanyaan besar yaitu : "Adakah yang salah dengan paradigma Pembangunan di Indonesia". Rumusan masalah yang akan diketengahkan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah deskripsi berbagai kasus pembangunan di Indonesia?
2. Bagaimanakah solusi pembangunan masyarakat (*community development*) yang mampu memperbaiki paradigma pembangunan di Indonesia?

## Potret Pembangunan Di Indonesia

Garis-garis Besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dari amanat GBHN di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional tidak menghendaki uni dimensionalisasi manusia Indonesia. Pemberian prioritas pada pembangunan bidang pembangunan ekonomi, tidak harus diartikan adanya pengabaian terhadap dimensi-dimensi lain pembangunan nasional. Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, pembangunan bidang-bidang lain juga harus ditingkatkan.

Namun *style of development* yang mendominasi proses pembangunan nasional kita sampai akhir-akhir ini nampaknya terlalu bertumpu pada mekanisme distribusi dan alokasi yang sentralistis dalam mencoba memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. *Style of development* yang demikian cenderung menginterpretasikan "pembangunan masyarakat" dalam arti sempit. Idealnya *Style of development* yang digunakan perlu mengacu kepada konsep pembangunan masyarakat yang sebenarnya. Dalam hal ini, konsep pembangunan masyarakat (*community development*), mengacu kepada beberapa prinsip dasar. Jim Ife, Dalam

bukunya *Community Development*, mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip dasar dalam pembangunan masyarakat<sup>10</sup>, antara lain:

- a. *Ecological Principles*. Prinsip ini lebih menekankan kepada adanya "ecological sustainability", yang didalamnya mengandung unsur: *Holism, sustainability, diversity, balanced development*.
- b. *Social Justice Principles*. Bahwa dalam pembangunan masyarakat tidak hanya berpihak kepada kepentingan ekologis, melainkan juga untuk membangun "fairer world", yang di dalamnya mengandung unsur: *addressing structural disadvantage, addressing discourses of disadvantage, empowerment, need definiton, dan human right*.
- c. *Valuing The Local Principles*. Prinsip ini didasarkan kepada ide "perubahan dari bawah" atau "bottom-up development", sebagai sentral dari ide pembangunan masyarakat, yang di dalamnya mengandung unsur: *valuing local knowledge, local resources, local skills, and local procesess*.
- d. *Process Principles*. Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan masyarakat, lebih menitikberatkan kepada proses dibandingkan dengan hasil, menitikberatkan kepada perjalanan dari pembangunan itu sendiri dibandingkan kepada tujuan akhir, dan yang lebih penting lagi bahwa pembangunan masyarakat harus lebih fokus kepada proses itu sendiri, yang di dalamnya mengandung unsur: *Process, outcome and vision, the integrity of process, consciousness raising, participation, peace and non-violence, inclusiveness, and community building*.
- e. *Global and Local Principles*. Prinsip menekankan bahwa terdapat keterkaitan antara aspek global dan aspek lokal yang sangat signifikan yang terjadi dalam praktek pembangunan masyarakat. Pemahaman terhadap globalisasi beserta dampaknya, serta efek dari isu praktek internasional, merupakan sebuah kondisi yang sangat kritis dalam pembangunan masyarakat. Perlu adanya perhatian kepada unsur: *linking the global and the local and anti-colonialist practise*.

---

4 Jim Ife, 2002. *Community Development*, Pearson Education Australia Pty Limited

Adanya pengabaian terhadap beberapa prinsip pembangunan masyarakat di atas tentunya berdampak yang sangat serius. Beberapa dampak kritis *style of development* yang berorientasi pada paradigma pertumbuhan antara lain:

a. *Pengorbanan ekologis*

Keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali harus dicapai melalui pengorbanan yang berupa distorsi ekologis, baik yang berwujud kerusakan tanah, pencemaran udara dan air, punahnya ekosisten flora dan fauna serta beberapa pengorbanan ekologis lainnya.

Praktek pembangunan telah mengeksploitir sumber-sumber ekologis sampai pada tingkat yang mengancam kerusakan ekologis yang sangat membahayakan kehidupan manusia di negeri ini. Dengan semakin tingginya korban ekologis dalam praktek, masyarakat kita semakin mengalami kelangkaan sumber daya alam, seperti kelangkaan sumber daya dan potensi alam yang tidak dapat diperbaharui seperti kelangkaan minyak mentah, kelangkaan energi dan sebagainya.<sup>5</sup>

b. *Penyusutan Sumber Alam*

Tingginya permintaan dan kebutuhan pembangunan untuk mencapai tingkat peroduktivitas serta pencapaian target pembangunan, ternyata menciderai sumber daya alam di negeri ini yang selama ini dikenal dengan sumber dayanya yang melimpat. Adanya investasi besar-besaran dari beberapa perusahaan seperti halnya PT. Freeport di Papua, Exxon mobile di Aceh serta beberapa perusahaan multinasional lainnya ternyata turut mengurangi kekayaan alam Indonesia tanpa dapat dinikmati untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Para perusahaan multinasional yang dibacking oleh kekuatan birokrasi pemerintah pusat ternyata mampu mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah.

---

5 JB. Kristiadi. 1997 Dimensi Praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia. Jakarta STIA LAN Press

Beberapa kekayaan alam Indonesia yang semakin lama semakin berkurang lebih banyak kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain pertambangan, gas bumi, mineral dan sebagainya. Penyusutan kekayaan alam tersebut semakin lama menyimpan "bom waktu" kelangkaan sumber daya di Indonesia.<sup>6</sup>

c. *Timbulnya Kesenjangan*

Adanya penggunaan strategi pemusatan pembangunan (*centralization development strategy*) oleh pemerintah mengakibatkan adanya pemusatan sentera-sentera atau wilayah-wilayah yang menjadi proyek-proyek pembangunan.

Secara struktural pemerintah pusat tetap menggenggam sebagian terbesar kekuasaan formal. Secara politik, masalah membangun dan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang langka telah memperkuat kekuasaan dan visibilitas pemerintah pusat. Akhirnya semua menyepakati bahwa legitimasi pemerintah pusat jauh lebih besar daripada legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah lokal/daerah.<sup>7</sup>

Dengan ditentukannya wilayah-wilayah sebagai "daerah satelit" dalam pembangunan, mengakibatkan timbulnya kesenjangan antar daerah - khususnya antara daerah yang menjadi pusat pembangunan dengan daerah-daerah pinggiran. Khusus di Indonesia, hal tersebut sangat terlihat perbedaan tingkat keberhasilan pembangunan antara wilayah di kepulauan Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur.

6 Moeljarto Tjokrowinoto, 1996. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

7 Coralie Bryant at.al. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES

d. *Timbulnya Dependensi*

Di dalam mengejar *capital-ratio* serta *capital-output* dalam pembangunan, pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan modal *capital* dalam pembangunan. Salah satu strategi menumpuk modal *capital* pembangunan tersebut antara lain melalui peningkatan investasi, baik oleh negara-negara donor ataupun pihak swasta dalam bentuk perusahaan multinasional. Pola strategi investasi secara besar-besaran dalam pembangunan di Indonesia, mengakibatkan pola ketergantungan pemerintah terhadap pihak donor atau donatur. Pihak donor atau donatur tersebut selalu menjadi sandaran utama dalam proses pembangunan di Indonesia. Salah satu contoh kasus adalah bagaimana pemerintah Indonesia belum mampu melepaskan diri dari "cengkeraman" dari IMF, Bank Dunia serta lembaga donor lainnya.

Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa pola investasi pembangunan tanpa adanya pembangunan kemandirian dalam pembangunan, mengakibatkan pola ketergantungan yang sangat tinggi kepada lembaga-lembaga donor. Dengan demikian pola investasi pembangunan akan menciptakan ketergantungan .

***Human Resource Development Oriented***

Bahwa sumber daya manusia mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan kinerja pembangunan agaknya tidak ada yang menyanggah. Kalau ada perbedaan wawasan, perbedaan itu terletak pada kualitas normatif sumber daya manusia. Pengertian *human resource development* (HRD) memang bersifat *ambiguous* dan dapat bersifat *misleading*. Di dalam perspektif pembangunan yang berpusat pada produksi/pertumbuhan, pembangunan SDM cenderung menempatkan manusia dalam fungsinya sebagai *resource* pembangunan.

Di dalam konteks ini harga atau nilai manusia ditentukan oleh relevansi kontribusinya pada proses produksi. Kualitas manusia "diprogramkan"

sedemikian rupa agar dapat sesuai dengan tuntutan pembangunan, atau dengan tuntutan masyarakat industrial. Masyarakat teknologi menjadikan manusia sebagai obyek dan memproduksi manusia melalui pendidikan dan lain sebagainya agar manusia menyesuaikan diri mereka dengan logika dari suatu sistem pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia, dengan demikian, cenderung diinterpretasikan ke dalam konotasi ekonomi. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan *conditio sine qua non production-centered development*. Menurut Moeljarto, terdapat dua pandangan terhadap pengembangan sumber daya manusia:

*Pandangan pertama* mendasarkan diri pada kearifan *production centered development* dinilai valid sepanjang mengikuti premise-premise yang menekankan pada terwujudnya nilai-nilai produktivitas, efisiensi dan optimasi. Pembangunan SDM dalam konteks pembangunan yang berpusat pada industri jelas merefleksikan perspektif fungsionalis.

*Pandangan kedua* menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan *human-centered development*. Pengembangan sumber daya manusia di dalam arti kedua ini menekankan pentingnya "pemampuan" (*empowerment*) manusia, kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia.<sup>8</sup>

Berdasarkan kedua pandangan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kedudukan manusia dalam pembangunan adalah sangat sentral. Bagi negara-negara modern, bahwa kemajuan negara sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan sumber daya manusia di dalam menguasai IPTEK.

Khusus terkait dengan proses pembangunan manusia seutuhnya yang menjadi misi utama pembangunan di Indonesia, maka strategi pengembangan SDM dibagi menjadi dua yaitu pengembangan kualitas

---

8 Moeljarto Tjokrowinoto, *Op.cit.* Hal. 28 - 29.

SDM secara nasional dan pengembangan SDM pada tingkatan aparatur sektor publik (pemerintahan).

Beberapa strategi pengembangan kualitas SDM pada tingkatan nasional perlu dilakukan melalui sektor pendidikan, melalui beberapa strategi sebagai berikut:

1. Perbaikan kesempatan pendidikan dan peningkatan faedah pendidikan, yang meliputi perencanaan lokasi sekolah, distribusi sarana dan prasarana pendidikan, serta distribusi tenaga pendidik.
2. Perbaikan efisiensi pendidikan: (1) Diperlukan adanya sinkronisasi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (*efisiensi eksternal kuantitatif*); (2) Diperlukan perencanaan yang tepat mengenai kesesuaian antara murid, ruang kelas, serta penggunaan fasilitas dalam proses belajar mengajar (*efisiensi internal kuantitatif*); (3) Diperlukan kurikulum, kualitas guru dan lainnya sesuai dengan kebutuhan (*efisiensi kualitatif*).
3. Peningkatan peran swasta dalam pendidikan umum, misalnya melalui pemberian beasiswa kepada anak didik dan mahasiswa yang tidak mampu, melakukan program magang guna menunjang keahlian.<sup>9</sup>

Dalam rangka mempersiapkan kerangka landasan yang kuat bagi terlaksananya proses pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), selain SDM nasional, SDM sektor publik menjadi perhatian yang serius. Tugas-tugas yang harus diemban oleh administrasi negara selain mewujudkan stabilitas, juga mendorong pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equalization*) dan keadilan (*equality*). Melihat telah terjadi pergeseran beberapa fungsi aparatur: dari agen pembangunan menjadi fasilitator dan motivator pembangunan; dari fungsi operasionalisasi kebijaksanaan pemerintah menjadi fungsi *public policy maker*; fungsi senteralisasi pembangunan ke arah desentralisasi pembangunan, maka sangat diperlukan pendekatan sistemik dalam peningkatan SDM aparatur.

---

9 JB Kristiadi. *loc.cit.*

Beberapa pendekatan sistemik dalam meningkatkan kualitas peran aparatur sektor publik menyangkut peran sebagai berikut:

1. **Tanggung gugat**, yaitu berkenaan dengan peningkatan kesadaran aparatur negara untuk memberikan pertanggungjawaban (*accountability*) dan kewenangan memegang tanggung gugat.
2. **Transparan**. Yaitu bertalian dengan keinginan menyelenggarakan administrasi negara yang terbuka dan mudah dijabarkan yang berlandaskan susunan konstitusional dan keabsahannya.
3. **Efisien**. Yaitu berhubungan dengan kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya dan dana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan dengan maksimal.
4. **Efektif**. Dalam arti birokrasi aparatur negara harus sadar benar-benar akan berhubungan antara tercapainya sasaran yang telah ditentukan dan hasil yang senyatanya dicapai atas program-program, proyek-proyek, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
5. **Pertanggungjawaban**. Yaitu ikut menciptakan suatu kondisi masyarakat dimana masyarakat dan aparatur negara yang melaksanakan tugas memberikan dukungan kepada kelembagaan masyarakat tentang hasil-hasil tugas-tugas sosialnya.
6. **Partisipatif**. Yaitu jaminan bahwa perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat di dalam masyarakat keseluruhan telah terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam menyatakan keinginan-keinginan dan harapan-harapan mereka kepada pemerintah.
7. **Keadilan**. Yaitu berkaitan dengan suatu jaminan bahwa terdapat keadilan dan pendistribusian yang cukup atas sumber-sumber bagi mereka yang berhak menerimanya.
8. **Bersih**. Dalam arti perilaku seluruh aparatur negara dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun moral.<sup>10</sup>

Kesemua pendekatan sistemik di atas dapat berhasil apabila telah terdapat peningkatan kualitas aparatur pemerintahan melalui

---

10 JB Kristiadi. *loc.cit*

pendidikan antara lain: pemberian Diklat yang teratur dan sistematis, pemberian tugas belajar yang berkesinambungan, pemberian kursus-kursus keterampilan, pendidikan nonformal dan sebagainya.

### **Good Governance dan Reformasi Sektor Publik**

Melihat dampak dari kebijakan pembangunan yang diterapkan selama ini, idealnya ditandai secara bertahap dengan upaya peralihan peranan pemerintah yang dominan sebagai agen dan pelaku langsung pembangunan di berbagai sektor produksi, ke arah peningkatan peran swasta dan swasta dengan mengurangi sebesar mungkin ketergantungannya pada pemerintah, serta memberikan peluang pertumbuhan pembangunan yang benar-benar berorientasi kepada masyarakat (*development based community*). Konsep ini pada dasarnya merupakan terjemahan dari konsep *Human resources development oriented* (pembangunan berorientasi manusia). Dalam pada itu, peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dapat pula dimanfaatkan sebagai momentum perampingan (*downsizing*) birokrasi dan mempertajam prioritas yang masih harus ditangani oleh pemerintah pada sektor publik yaitu perlunya adanya reformasi sektor publik. Reformasi di sektor publik sebagai konsekuensi dari kemajuan dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dihindarkan, karena dalam kenyataannya, perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme : Deregulasi, Debirokratisasi dan Desentralisasi.

Kebijakan Deregulasi, selain untuk membenahi layanan di sektor publik secara makro dan mikro, dimaksudkan juga untuk memberi kepastian berusaha dan menumbuhkan manajemen yang transparan di sektor publik. Dalam kaitannya, aparatur di daerah perlu dimotivasi untuk menyadari peran penting dan tanggung jawabnya terhadap kelancaran jalannya setiap kebijaksanaan pemerintah yang telah digariskan (*increasing the local authorithies awareness*).

Di bidang kebijakan *Debirokratisasi*, beberapa kebijakan juga telah mulai diusahakan misalnya jumlah pegawai negeri mulai dikendalikan

dan lebih hati-hati, dan pemenuhan kekuarangan tenaga kerja yang lebih diutamakan penempatannya secara silang, antar instansi baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Kegiatan penting dalam hal ini yang menjadi perhatian utama adalah *menyederhanakan kelembagaan, ketatalaksanaan dan prosedur kerja aparatur*.

Dalam kaitannya dengan upaya *desentralisasi*, maka pemerintah dihadapkan pada masalah yang lebih bersifat teknis ekonomis ketimbang politik. Ukuran-ukuran yang kini siap pakai adalah jauh lebih baik dan lebih bersifat pragmatis, dan desentralisasi lebih dipandang sebagai upaya untuk mempercepat kalur pengambilan keputusan di tingkat daerah. Oleh karena itu fokus desentralisasi dapat difokuskan pada penyempurnaan mekanisme dalam pemerataan pemberian pelayanan kepada masyarakat (*delivery of services*).

### Penutup

Dari beberapa penjelasan di atas terdapat beberapa hal yang dapat kita simpulkan dalam tulisan ini antara lain:

1. Paradigma pertumbuhan dalam pembangunan di Indonesia selama ini ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, namun di sisi lain menimbulkan problematika yang membahayakan antara lain: pengorbanan ekologis, penyusutan sumber daya alam, timbulnya kesenjangan serta menciptakan pola ketergantungan.
2. Sudah saatnya pembangunan di Indonesia menitikberatkan kepada *human centered development*, dengan penekanan kepada pengembangan SDM tingkat nasional serta pengembangan SDM sektor publik dalam rangka mencapai misi pembangunan manusia yang seutuhnya.
3. Orientasi pembangunan nasional lebih dititikberatkan kepada pembangunan berbasis masyarakat, sebagai bentuk penerapan dari *human centered development*. Hal ini sesuai dengan konsep *good governance* yang ingin diterapkan dalam pemerintahan.

**Daftar Bacaan:**

- Coralie Bryant at.al. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES
- Ife, Jim. 2002. *Community Development*, Pearson Education Australia Pty Limited
- JB. Kristiadi. 1997 *Dimensi Praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia*. Jakarta STIA LAN Press
- Moeljarto.1993. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep. Arah dan Strategi*. Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya.
- Moeljarto Tjokrowinoto, 1996. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sadli M. 1973. *Penerapan Teknologi dan kesempatan Kerja: Pengalaman Indonesia*. PRISMA, No.3 Tahun II.

